

Judul : Desa binaan imigrasi, komisi XIII ingatkan kesiapan SDM daerah
Tanggal : Sabtu, 28 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Desa Binaan Imigrasi Komisi XIII Ingatkan Kesiapan SDM Daerah

KOMISI XIII DPR menyoroti implementasi Program Desa Binaan yang digagas Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas). Program ini bertujuan memperkuat edukasi keimigrasian hingga ke tingkat desa agar masyarakat lebih paham mengenai prosedur dokumen resmi.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mempertanyakan kesiapan daerah dalam menjalankan program itu secara optimal, mengingat keterbatasan anggaran dan jumlah SDM instansi terkait. Selain itu, harus ada kejelasan sasaran desa binaan, apakah hanya perwakilan di tiap kabupaten atau diterapkan secara menyeluruh.

"Jika hanya representatif, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial di daerah lain yang belum mendapatkan program," ujar Andreas dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Politikus PDIP itu menilai, perlu ada pendalaman lebih lanjut terkait skema pemerataan program agar pelaksanaannya berjalan adil dan merata di seluruh daerah. Itu agar tidak terjadi kesenjangan informasi maupun fasilitas antarwilayah hanya karena perbedaan status desa binaan.

Selanjutnya, peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) sebagai pendamping dinilai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program. "Kesiapan mental serta kemampuan petugas di tingkat desa menjadi faktor utama penentu keberhasilan kegiatan itu," katanya.

Senada, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengingatkan pentingnya pendekatan kolaboratif yang terstruktur, berkelanjutan, dan terkoordinasi lintas sektor. Palsalnya,

Pemerintah Pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh, komitmen nyata, serta keterlibatan aktif dari Pemda.

Selain itu, dia juga mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mengatasi kendala klasik, terutama terkait keterbatasan anggaran dan sumber daya. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu menutup berbagai celah keterbatasan yang masih terjadi di internal imigrasi.

"Stakeholder daerah perlu dilibatkan secara aktif, bergandengan tangan, sehingga keterbatasan anggaran dan SDM dapat diatasi bersama," tegas politikus Partai NasDem itu.

Dia meyakini, sinergi lintas sektor adalah kunci agar tujuan perlindungan masyarakat, termasuk bagi pekerja migran Indonesia (PMI) bisa berjalan optimal. Tanpa kolaborasi, pengawasan keimigrasian di tingkat akar rumput akan sulit mencapai target berkelanjutan. Karena itu, secara kelembagaan, pihaknya mendukung penuh penguatan dan perluasan program ini.

"Dukungan ini diberikan dengan catatan pelaksanaan harus transparan dan berbasis pada kebutuhan riil daerah," ucapnya.

Desa Binaan Imigrasi merupakan program yang merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, pelaksanaannya juga berlandaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Saat ini, program telah berjalan di beberapa titik seperti Provinsi DIY, Kabupaten Karawang, Jabar, Kotamadya Jakarta Barat, hingga Kota Semarang, Jateng. ■ PYB